



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN JULIARTA**
2. Jabatan : **DOSEN**
3. NHK : **413347**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah Seluas 25 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/54 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 479.550.000**

1. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.550.000
3. MOTOR, HONDA CBR250 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 51.981.250**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 150.281.179**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.241.812.429

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.241.812.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.